

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PROMOVENDUS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SKEMA	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
INTISARI	xxi
<i>ABSTRACT</i>	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Keaslian Penelitian	19
E. Manfaat Penelitian	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	35
A. Tinjauan Pustaka	35
1. Kejaksaan Republik Indonesia.....	35
a. Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia	35

b.	Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia	64
c.	Kewenangan Kejaksaan RI dalam Pemberantasan TPK di Indonesia	67
d.	Tujuan hukum Pidana Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum Dalam Upaya Pemberantasan TPK	79
e.	Kebijakan kriminal dan Hukum Pidana dalam Upaya Memberantas Kejahatan	92
2.	Tindak Pidana Korupsi (TPK)	162
a.	Pelaku Korupsi	167
b.	Rumusan Delik Korupsi	173
c.	Sebab dan Akibat Korupsi	204
1)	Sebab Korupsi	207
2)	Akibat Korupsi	219
d.	Modus Operandi Korupsi	221
e.	Peran Alat Bukti Saksi Mengungkap TPK	228
3.	Penyidikan	235
a.	Tugas dan Kegiatan Penyidikan	235
b.	Lembaga Yang Berwenang dalam Melakukan Tugas Penyidikan TPK	241
c.	Proses Penyidikan Sampai Penyerahan Berkas Perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU)	243
B.	Landasan Teori	251

1. Teori Pemberantasan Korupsi	252
a. Umum	252
b. Dasar Hukum	255
2. Teori Birokrasi	268
a. Arti dan Pentingnya Reformasi Birokrasi	268
b. Kebijakan Reformasi dan Good Governance (Kepemerintahan yang baik)	272
c. Membangun Kompetensi dan Profesionalitas	280
d. Tugas Tiga Pilar Pemerintahan	283
e. Penataan Kelembagaan	288
f. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur	291
g. Netralitas Pegawai Negeri Sipil	296
3. Teori Pengawasan	307
C. Batasan Operasional	316
1. Pengertian Tentang Kejaksaan RI	316
2. Pengertian Tentang korupsi dan Pegawai Negeri	323
a. Pengertian Korupsi	323
b. Pengertian Pegawai Negeri	333
3. Pengertian Tentang Penyidikan	335

4. Pengertian Tentang Indeks	339
5. Pengertian Tentang Prestasi	339
6. Pengertian Tentang Kinerja	340
7. Pengertian Kajian	341
8. Pengertian tentang Efektifitas, Tidak Efektif, Cukup Efektif, Efektif dan Sangat Efektif	341
9. Ukuran Indeks Prestasi Jaksa Penyidik dalam Pemberantasan TPK	343
10. Dampak positif, negatif, dan tujuan serta dasar hukum sistem target mengungkap/memberantas TPK di Indonesia	347
a. Dampak Positif	347
b. Dampak Negatif	347
c. Tujuannya	348
d. Dasar Hukum Sistem Target Pengungkapan Terhadap TPK	349
BAB III METODE PENELITIAN	351
A. Jenis Penelitian	354
B. Data dalam Penelitian	357
C. Nara Sumber	359
D. Metode Pengumpulan Data	359

E. Metode Analisis Data	360
F. Jalannya Penelitian	361
G. Batasan Konseptual dan Operasional	361
H. Kesulitan dalam Penelitian dan Cara Mengatasinya	371
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	374
A. Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kejaksaan RI dalam Pemberantasan TPK Berdasarkan Indeks Prestasi Penyidikan.....	374
1. Hasil Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan TPK	378
2. Faktor-Faktor Penghambat dalam Mengungkap/ Memberantas TPK	390
a. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang Tidak Konsisten	397
b. Internal Kejaksaan Republik Indonesia	399
1) SDM-nya belum maksimal	400
2) Belum diterapkannya Ilmu Bela Negara	400
a) Wawasan Kebangsaan	400
b) Belum Memiliki Jiwa Pengabdian dan Jiwa Juang yang Tinggi	404
c) Belum Memiliki Jiwa Rela Berkorban Pribadi untuk Kepentingan Negara	407

d) Kurang Berani Menghadapi Tantangan dalam Bertugas	408
e) Belum Memahami tentang Keamanan dan Pengamanan	409
f) Cinta Terhadap Korps Negara dan Bangsa	411
g) Loyalitas yang Tinggi	412
3) Jaksa Penyidik sering terjadi tugas rangkap dibidang lain	413
4) Kemampuan Jaksa Penyidik Masih Terbatas	421
5) Integritas Etika Moral Jaksa Penyidik TPK belum memadai	427
6) Kekurangan Tenaga Jaksa Penyidik TPK	432
7) Sarana Prasarana dan Fasilitas masih belum memadai (Terbatas)	437
8) Kesejahteraan Kurang Memadai	438
9) Jaksa Penyidik TPK belum memiliki beberapa sifat	441
10) Jaksa Penyidik TPK Bertugas di Suatu Tempat Terlalu Lama	447
11) Melalaikan Sektor Pengamanan	449
12) Kurangnya Penghargaan terhadap Jaksa Penyidik yang Berprestasi	450

13) Umumnya Jaksa Penyidik TPK dan atau Insan Adhyaksa Masih Memiliki Sifat Cengeng dan Kurang Santun	454
c. Eksternal Kejaksaan Republik Indonesia.....	455
1) Pelaku TPK pada umumnya Pejabat Publik .	455
2) Masyarakat belum mau melapor jika adanya suatu TPK	456
3) Pelaku TPK Melarikan Diri	460
4) Pelaku TPK tidak mau hadir diperiksa karena sakit	463
5) Pelaku TPK mengabaikan Etika Moral	469
B. Prospek Pengaturan Meningkatkan Kemampuan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pemberantasan TPK di Masa Mendatang	473
1. Peraturan Perundang-undangan	475
a. Aspek Kemampuan	476
b. Aspek Kegunaan	477
2. Internal Kejaksaan Republik Indonesia	480
a. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) Kejaksaan Republik Indonesia	486
b. Penerapan Ilmu Bela Negara (IBN) di Institusi Kejaksaan Republik Indonesia.....	519
a) Wawasan Kebangsaan	529

b) Jiwa Pengabdian dan Jiwa Juang yang Tinggi	533
c) Rela Berkorban Pribadi untuk Kepentingan Negara	535
d) Berani Menghadapi Tantangan dalam Bertugas	536
e) Meningkatkan Kemampuan tentang Keamanan dan Pengamanan	537
f) Cinta Terhadap Korps Negara dan Bangsa ...	541
g) Loyalitas yang Tinggi	542
c. Meningkatkan Peran Pengawasan dalam Upaya Mewujudkan Jaksa Penyidik Professional dalam Mengungkap TPK	543
d. Menciptakan dan mendayagunakan struktur organisasi di Internal Kejaksaan Republik Indonesia	552
e. Meningkatkan Kemampuan Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Kejaksaan Republik Indonesia	564
f. Hindari Jaksa Penyidik TPK Tugas Rangkap	582
g. Meningkatkan Integritas Etika Moral Jaksa Penyidik TPK	586
h. Meningkatkan Sarana Prasarana	588

i.	Meningkatkan Kesejahteraan.....	590
j.	Pemberian Penghargaan dan atau Pemberian Sanksi kepada Personil Kejaksaan Republik Indonesia	602
3.	Eksternal Kejaksaan Republik Indonesia.....	606
a.	Pelaku TPK setelah ditetapkan sebagai tersangka segera ditahan	606
b.	Memberikan Keberanian Kepada Masyarakat untuk melapor Jika ada TPK	607
c.	Bentuk Tim dengan Pihak Dinas Kesehatan dalam Upaya Memberantas TPK	607
d.	Tingkatkan Integritas Moral	607
BAB V	PENUTUP	609
A.	Kesimpulan	609
B.	Saran.....	611

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Pembanding Keaslian Disertasi (Pebanding dengan kajian-kajian lain)	20
Tabel 2.1 : Fungsi dan Disfungsi Model Weber	300
Tabel 4.1 : Daftar Tabel Hasil Penyidikan selama 11 (sebelas) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014	381
Tabel 4.2 : Data Statistik Hasil Kinerja Jaksa Penyidik 11 (sebelas) tahun (2004-2014)	387
Tabel 4.3: Jadwal Program Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2014	513
Tabel 4.4 : Tunjangan Jabatan Fungsional Jaksa	600

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Struktur Organisasi Kejaksaan Republik Indonesia.....	66
Gambar 2.2: Kebijakan atau Upaya Mencapai Kesejahteraan Sosial	95
Gambar 2.3: <i>Criminal Policy as a Science of Policy</i>	96
Gambar 2.4: Strategi Penanggulangan Kejahatan di Republik Czech	122
Gambar 2.5: Program Pencegahan Sosial yang Integral dari Berbagai Departemen Terkait	123
Gambar 2.6: Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi	250
Gambar 2.7: Penataan Kelembagaan dan Penyederhanaan Ketatalaksanaan	270

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Proses Tindakan Represif Penyidikan
- Lampiran 2: Peraturan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Nomor: B-913/F/FS.3/9/1998 tanggal 8 September 1998.....
- Lampiran 3: Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Nomor: B-
116/Fd.2/Fd.1/02/2006 tanggal 10 Februari 2006
- Lampiran 4: Jampidsus Nomor: Kep-1904/F/FJP/12/2007 tanggal 18
Desember 2007
- Lampiran 5: Jampidsus Nomor : B-116/Fd.2/Fd.1/02/2009 tanggal 10
Februari 2009
- Lampiran 6: Daftar Pertanyaan dan Jawaban dari Direktur Penyidikan
Pidsus Kejaksaan RI.

DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
ASN	: Aparat Sipil Negara
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BA	: Berita Acara
BAP	: Berita Acara Pemeriksaan
BPKP	: Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan
CABJARI	: Cabang Kejaksaan Negeri
CPNS	: Calon Pegawai Negeri Sipil
DIK	: Penyidikan
DIKLAT	: Pendidikan dan Latihan
Dir Dik	: Direktur Penyidikan
DLL	: Dan lain-lain
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
HAM	: Hak Azasi Manusia
Hlm.	: Halaman
HPH	: Hak Pengelolaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri
IBN	: Ilmu Bela Negara
ICW	: Indonesia Corruption Watch

JA	: Jaksa Agung
JAMPIDSUS	: Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
KEJATI	: Kejaksaan Tinggi
KEPJA	: Keputusan Jaksa Agung
KKN	: Kolusi Korupsi Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LID	: Penyelidikan
LJK	: Lembar jawaban Komputer
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PERJA	: Peraturan Jaksa Agung
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PU	: Penuntut Umum

Pupenkum	: Pusat Penerangan Hukum
RENTUT	: Rencana Tuntutan
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SDM	: Sumber Daya Manusia
SK	: Surat Keputusan
SPDP	: Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
SPP	: Sistem Peradilan Pidana
TPK	: Tindak Pidana Korupsi
TUT	: Penuntutan
UGM	: Universitas Gajah Mada
UNAND	: Universitas Andalas
UNSRAT	: Universitas Samratulangi
UNSRI	: Universitas Sriwijaya
UU	: Undang Undang
UU PK	: Undang-Undang Pokok Kejaksaan
UUD	: Undang Undang Dasar
UUMA	: Undang-Undang Mahkamah Agung
VOC	: Verenigde Oost Indische Compagnie
WAJA	: Wakil Jaksa Agung
Waskat	: Pengawasan Melekat
Wasnal	: Pengawasan Fungsional
WVS	: Wetboek van Strafrecht
YME	: Yang Maha Esa